

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia yang meliputi 34 provinsi memiliki struktur perekonomian yang beragam. Struktur perekonomian yang beragam di masing-masing daerah di Indonesia menghasilkan perbedaan kontribusi PDRB antar daerah. Adanya perubahan struktur perekonomian dan perbedaan kontribusi ekonomi sektoral di Indonesia dipengaruhi oleh potensi yang dimiliki wilayah yaitu sumber-sumber yang ada (Adi, 2001). Berdasarkan hal tersebut perlu adanya pembangunan yang lebih baik demi terciptanya perubahan ekonomi berdasarkan spesialisasi ekonomi sektoral di masing-masing daerah di Indonesia.

Pembangunan yang lebih baik diperlukan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada masing-masing sektor perekonomian di Indonesia. Pembangunan merupakan konsep dinamis sebagai aktifitas tanpa akhir untuk mencapai masyarakat adil dan makmur. Konsep yang dinamis pada pembangunan nasional atau daerah mengandung perubahan secara terus-menerus dalam setiap aspek kehidupan masyarakat. Tujuan pembangunan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat suatu negara secara bertahap, sehingga tercapai suatu masyarakat yang adil dan makmur secara material maupun spiritual, sesuai dengan yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) 1945.

Pembangunan nasional merupakan usaha peningkatan kualitas masyarakat Indonesia yang dilakukan secara berkelanjutan, berlandaskan kemampuan

nasional, dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hakikat pembangunan nasional adalah pembangunan secara menyeluruh di segala bidang. Pembangunan yang pada akhirnya harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat dan institusi-institusi nasional, disamping tetap mengejar akselerasi pertumbuhan ekonomi, penanganan ketimpangan pendapatan serta pengentasan kemiskinan (Todaro, 2006:65).

Program pembangunan daerah mempunyai andil besar dalam pemerataan dan perluasan pembangunan. Tujuan utama dalam upaya pembangunan daerah adalah meningkatkan jumlah dan jenis peluang kerja untuk masyarakat daerah (Arsyad, 2010:374). Pembangunan daerah dapat dilakukan dengan mengelola sumber daya secara efisien dan kreatif melalui pembagian kerja terstruktur oleh sistem ekonomi lokal. Perancangan pembangunan ekonomi daerah memerlukan analisis mendalam atas peran yang spesifik pada masing-masing daerah.

Pada umumnya pembangunan daerah difokuskan pada pembangunan ekonomi melalui usaha pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan peningkatan produksi barang dan jasa, dapat diukur dengan besaran yang disebut Produk Domestik Regional Bruto (PDRB). Faktor utama yang menentukan pertumbuhan ekonomi adalah adanya permintaan barang dan jasa dari luar daerah, sehingga sumber daya lokal akan dapat menghasilkan kekayaan daerah karena dapat menciptakan peluang kerja di daerah (Boediono,1999:1).

Ada sembilan sektor ekonomi atau kelompok lapangan usaha yang dapat dihitung dalam PDRB, yaitu:

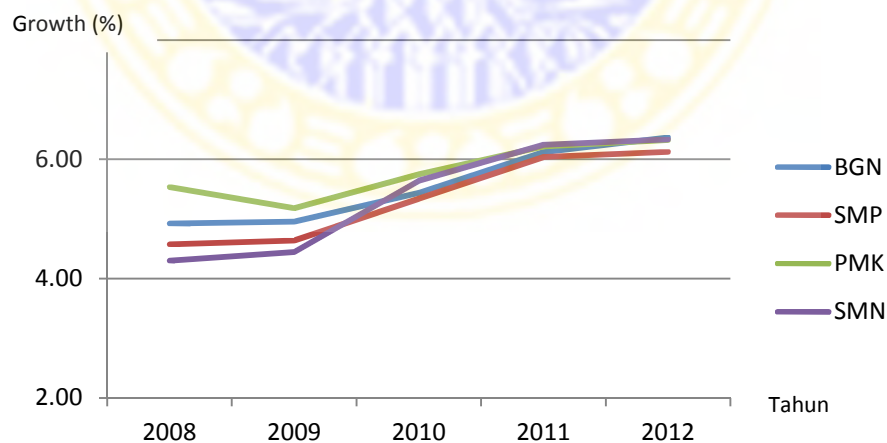
1. Sektor pertanian
2. Sektor pertambangan dan penggalian
3. Sektor industri pengolahan
4. Sektor listrik, gas dan air bersih
5. Sektor bangunan
6. Sektor perdagangan, hotel dan restoran
7. Sektor pengangkutan dan komunikasi
8. Sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan
9. Sektor jasa-jasa

Berdasarkan dari sektor-sektor ekonomi yang menjadi bagian dari PDRB tersebut, kondisi struktur ekonomi dari suatu daerah dapat dinilai. Suatu daerah dapat dikatakan agraris apabila peran sektor pertanian sangat dominan dalam pembentukan PDRB, demikian pula sebaliknya dikatakan sebagai daerah industri bila yang lebih dominan adalah sektor industrinya.

Usaha peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan daerah memerlukan strategi dan kebijakan pembangunan yang sesuai dengan potensi dan permasalahan yang ada di tiap-tiap daerah dalam wilayah pembangunan. Sebagai tindak lanjut dalam pembangunan daerah, pemerintah menerapkan kebijakan tersebut secara regional dan sektoral. Kebijakan regional diarahkan pada pengembangan potensi dan kemampuan sumber daya yang ada, sedangkan kebijakan sektoral lebih menekankan pada pengelolaan pembangunan yang terdiri

dari berbagai sektor ekonomi. Penggunaan kebijakan sektoral pembangunan lebih diarahkan pada peningkatan produksi, produktivitas serta pembangunan sarana dan prasarana fisik yang secara langsung menunjang kebutuhan dasar (Aziz dalam Fatriniasari, 2005:05).

Pulau Madura yang terdiri dari Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan dan Kabupaten Sumenep, merupakan salah satu bagian wilayah pembangunan dari provinsi Jawa Timur. Pulau ini mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup baik selama 5 tahun terakhir. Gambar 1.1 menunjukkan Pulau Madura memiliki pertumbuhan yang positif, sesuai pada lampiran 1 perubahan PDRB masing-masing kabupaten mengalami peningkatan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pertumbuhan paling tinggi di tahun 2012, Bangkalan (6,37%), Sampang (6,12%), Pamekasan (6,32%), dan Sumenep (6,33%).



Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur Tahun 2013

Gambar 1.1
Laju Pertumbuhan Ekonomi Pulau Madura (Bangkalan, Sampang, Pamekasan, Sumenep) Periode 2008-2012 (%)

Pelaksanaan pembangunan di daerah Madura ditujukan demi terwujudnya pertumbuhan ekonomi daerah dan kesejahteraan masyarakat. Tanpa pertumbuhan ekonomi, pembangunan ekonomi tidak akan berhasil. Pertumbuhan ekonomi yang terjadi harus disertai dengan pemerataan hasil-hasil pembangunan, sehingga kesejahteraan masyarakat juga akan terjadi peningkatan.

Pertumbuhan ekonomi daerah dapat dilihat dari perkembangan PDRB riil. Selain pertumbuhan ekonomi, struktur ekonomi yang tangguh akan memperkuat ekonomi Madura pada khususnya dan Jawa Timur pada umumnya. Potensi sumber daya alam yang banyak tersedia di Madura merupakan salah satu modal dalam meningkatkan perekonomian daerah. Dilihat dari kondisi alamnya, sektor pertanian masih menjadi tumpuan hidup masyarakat, meskipun peranannya berangsur-angsur tergeser oleh sektor industri. Pada Tabel 1.1 selama periode 2002-2012 menjelaskan mengenai dinamika pertumbuhan ekonomi dan peranan sektor-sektor ekonomi terhadap PDRB masing-masing kabupaten di Madura.

Tabel 1.1
Kontribusi Sektor-sektor Ekonomi Terhadap PDRB Kabupaten di Pulau Madura Periode 2002-2012 (dalam persen)

Nama Sektor	Bangkalan		Sampang		Pamekasan		Sumenep	
	2002	2012	2002	2012	2002	2012	2002	2012
Pertanian	38,6	32,2	51,3	41,5	56,1	46,0	56,0	46,1
Pertambangan & Penggalian	1,4	1,6	10,7	9,1	1,5	1,1	6,2	9,7
Industri Pengolahan	4,0	3,9	0,9	1,0	1,1	2,9	2,8	2,2
Listrik dan Air bersih	0,7	0,8	0,7	0,4	1,2	1,0	0,1	0,1
Bangunan	3,9	7,5	3,1	2,2	4,0	4,7	1,8	1,7
Perdagangan, Hotel & Restoran	26,7	28,3	16,2	27,6	10,9	16,3	15,5	23,7
Pengangkutan & Komunikasi	6,5	7,2	2,2	2,6	4,1	4,9	3,4	2,6
Keuangan, Persewaan & Jasa Perusahaan	4,4	4,6	3,6	3,8	5,8	7,0	3,9	4,9
Jasa-jasa	13,8	14,0	11,3	11,8	15,4	16,1	10,2	8,9
Jumlah	100	100	100	100	100	100	100	100

Sumber: BPS Provinsi Jawa Timur, 2013

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat diketahui bahwa secara umum kontribusi terbesar sektor ekonomi di Madura masih sektor pertanian. Hal ini dinyatakan bahwa peranan sektor pertanian dalam menyediakan lapangan kerja di Madura sangat besar. Selama kurun waktu 2002-2012 kontribusi sektor pertanian meningkat lebih lambat dibandingkan dengan sektor perdagangan, hotel & restoran yang pertumbuhannya lebih cepat, sehingga secara persentase kontribusi sektor pertanian berangsur-angsur menurun dan kontribusi sektor perdagangan, hotel & restoran semakin meningkat.

Secara persentase sektor pertanian di Bangkalan menurun dari 38,6% menjadi 32,2%, dan sektor perdagangan meningkat dari 26,7% menjadi 28,3%. Sektor pertanian di Sampang persentasenya menurun dari 51,3% menjadi 41,5%, sedangkan sektor perdagangan meningkat dari 16,2% menjadi 27,6%. Pamekasan memiliki penurunan kontribusi sektor pertanian dari 56,1% menjadi 46% dan peningkatan sektor perdagangan dari 10,9% menjadi 16,3%. Peranan sektor pertanian di Sumenep menurun dari 56% menjadi 46,1%, sedangkan peranan sektor perdagangan mengalami peningkatan dari 15,5% menjadi 23,7%.

Kondisi dan potensi ekonomi daerah merupakan modal dasar yang dimiliki Pulau Madura yang dapat digunakan untuk mencapai sasaran pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat, sehingga perlu langkah strategis dalam pembuatan kebijakan dari pemerintah yang berupa pemanfaatan sektor-sektor basis dan potensial dari masing-masing daerah untuk memajukan perekonomian daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka akan dianalisa terjadinya perubahan struktur ekonomi dengan alat-alat analisis berupa *Location Quotient*

(*LQ*), *Shift Share*, Model Rasio Pertumbuhan (MRP) dan *Overlay Analysis* dan akan ditulis dengan judul “Transformasi Struktural dan Pertumbuhan Ekonomi pada Empat Kabupaten di Wilayah Madura Tahun 2002-2012”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka terdapat rumusan masalah sebagai berikut:

1. Sektor-sektor apakah yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di wilayah Madura tahun 2002-2012?
2. Apakah terjadi transformasi struktural di wilayah Madura tahun 2002-2012?
3. Sektor-sektor potensial manakah yang dapat dijadikan prioritas pembangunan sektoral untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Menganalisis dan mengetahui sektor-sektor yang menjadi sektor basis dan non basis dalam perekonomian di wilayah Madura tahun 2002-2012.
2. Menganalisis dan mengetahui transformasi struktural yang terjadi di wilayah Madura tahun 2002-2012.
3. Menganalisis dan mengetahui sektor-sektor potensial yang dapat dijadikan prioritas pembangunan untuk dikembangkan dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di wilayah Madura.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat ilmiah, digunakan sebagai salah satu referensi dalam menambah pengetahuan mengenai ilmu ekonomi umumnya dan ekonomi regional khususnya serta ilmu pengetahuan lain seperti pembangunan ekonomi dan ekonomi perencanaan.
2. Manfaat penentuan kebijakan, diharapkan penelitian ini mampu menjadi rujukan dalam penentuan kebijakan pembangunan dan perencanaan daerah di wilayah Madura.
3. Manfaat praktis, penelitian ini diharapkan bisa menjadi tambahan informasi bagi penulis dan pembaca memahami permasalahan mengenai ekonomi regional dan ekonomi perencanaan pembangunan.

1.5 Sistematika Penulisan Skripsi

Sistematika skripsi dibagi dalam lima bab, antara bab satu dengan bab yang lain saling berkaitan. Kerangka skripsi secara garis besar adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Memuat landasan teori atau kerangka konsep yang sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Selain itu juga dikemukakan penelitian

sebelumnya yang memiliki kesamaan dengan penelitian ini, serta hipotesis dan metode analisis.

BAB III : METODE PENELITIAN

Memuat pendekatan penelitian yang dilakukan, identifikasi variabel definisi operasional variabel, jenis dan sumber data, prosedur pengumpulan data, dan teknis analisis.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Memuat gambaran umum variabel-variabel operasional selama periode penelitian, deskripsi hasil penelitian, pembahasan dan interpretasi hasil analisis.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran yang diajukan berdasarkan hasil dari penelitian.

Daftar Pustaka

Lampiran